

PENGARUH *RELATED PARTY TRANSACTION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN VARIABEL MODERASI PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2017

Chindy Helfin & Estralita Trisnawati
Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara
Email: chindyhelfin@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the effect of related party transaction to tax avoidance with corporate governance disclosure as a moderating variable that listed in Indonesia Stok Exchange, with a total of 109 samples. This study uses secondary data which were tested using software SmartPLS 3,0. The result of this study suggests that related party transaction significantly influence tax avoidance. However, corporate governance disclosure doesn't moderate the effect of related party transaction on tax avoidance.*

Key words: *Related Party Transaction, Tax Avoidance, Corporate Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance* dengan pengungkapan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan total 109 sampel perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang kemudian di olah dengan menggunakan *software SmartPLS 3.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *related party transaction* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan dan pengungkapan tata kelola perusahaan tidak memoderasi pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Related Party Transaction, Tax Avoidance, Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan.*

Latar Belakang

Pajak sebagaimana diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Pajak menjadi sumber utama pendapatan Negara untuk pembangunan di segala bidang. Hampir sekitar 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Jadi pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak kepada negara adalah perusahaan. Apabila keuntungan yang dihasilkan perusahaan berjumlah besar dan meningkat dalam kegiatan operasionalnya, maka pajak yang disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintahpun juga akan besar jumlahnya. Tetapi menurut dari pihak perusahaan, pajak adalah suatu beban yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dengan demikian perusahaan mencari-cari celah dalam mengurangi pembayaran pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (*Tax Avoidance*). *Corporate Governance* berperan sebagai penengah antara perusahaan dan pemerintah yang memiliki

andil dalam mengawasi perusahaan yang memungkinkan melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak. Identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance* dengan variabel moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan.

Kajian Teori

Menurut Schroeder (2005) menyebutkan bahwa “keagenan merupakan hubungan antara dua pihak (agent) yang telah disetujui, dimana satu pihak lain (principal)”. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai sebuah titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa “hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principal)”. Anthony dan Govindarajan (1995) menyatakan bahwa “konsep agency theory adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal dan agent”.

Sehingga dapat kita disimpulkan bahwa pengertian teori keagenan adalah hubungan antara dua belah pihak yaitu antara pemilik/pemegang saham (principal) dengan manajemen (agent), dimana hubungan keduanya dihubungkan dengan sebuah kontrak yang disetujui keduanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingannya sendiri antara principal maupun agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu meningkat.

Menurut Nasution dan Doddy (2007), “agent termotivasi untuk memaksimalkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya”. Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal.

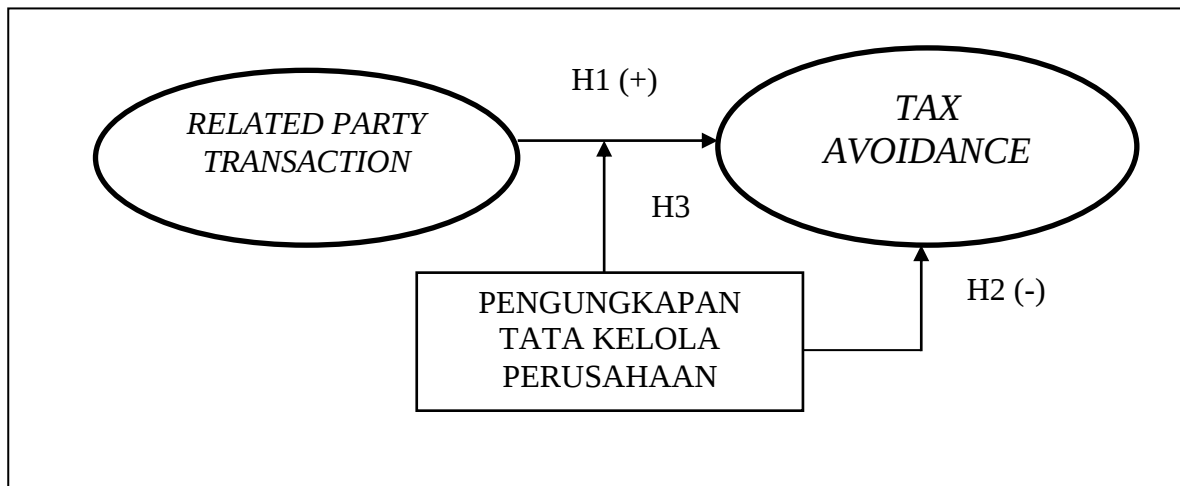
Adanya ketidaksamaan tujuan atau kepentingan serta informasi yang diperoleh antara pihak manajer dengan pihak pemegang saham pengendali maupun non pengendali akan menimbulkan pihak manajer melakukan tindakan yang tidak dapat diketahui oleh pihak pemegang saham seperti praktik *tax avoidance* yaitu meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara legal untuk mencapai tujuan manajer itu sendiri. Pihak Manajer akan meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara menurunkan laba perusahaan dan akan mengesampingkan tujuan dari pihak pemegang saham non pengendali yang ingin meningkatkan nilai perusahaan. Karena itu diadakannya Tata Kelola Perusahaan sebagai penengah antara principal dengan agent untuk meminimalkan asimetri informasi yang terjadi.

Related Party Transaction. Menurut Elhelaly (2014:579), “*Related party transaction is defined as a transfer or obligations between related parties, whether this transfer is expressed in monetary terms or not*”. Berdasarkan pernyataan diatas, kita dapat mengetahui bahwa *related party transaction* merupakan transfer atau obligasi antara kelompok yang memiliki hubungan. Berdasarkan pernyataan diatas juga kita dapat mengetahui bahwa bentuk transfer atau obligasi tersebut dapat dalam bentuk moneter atau dapat juga tidak.

Pengungkapan Tata Kelola. Menurut Herawati (2008) dalam Oktofian (2015) mendefinisikan bahwa “*Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham”. Isgiyarta dan Triatiarini (2005) dalam Oktofian (2015) mendefinisikan bahwa “*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: *Related Party Transaction* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H2: Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

H3: *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dimoderasi oleh pengungkapan tata kelola perusahaan.

Metodologi

Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, menguji hipotesis, dan menggambarkan fakta yang terjadi pada beberapa variabel yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dengan menggunakan variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, variabel independen yang digunakan adalah *related party transaction*, dan variabel moderasinya adalah pengungkapan tata kelola perusahaan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sampel diterapkan dengan cara menerapkan terlebih dahulu kriteria-kriteria sampel yang dibutuhkan. Kriteria yang diterapkan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu: perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan manufaktur bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan manufaktur yang tidak melakukan *Initial Public Offering* (IPO), perusahaan manufaktur yang tidak melakukan *delisting*, *relisting* dan *merger*, perusahaan manufaktur yang tidak pindah ke sektor lain selain sektor manufaktur, perusahaan manufaktur yang mempunyai periode laporan keuangan lengkap satu tahun selama periode

2013-2017. Jumlah data yang memenuhi syarat yaitu bertotal 545 data.

Tax Avoidance. Menurut Pohan (2013: 23) menjelaskan “*tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak”. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan rasio berikut ini :

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Jumlah pajak yang dibayarkan (lap. arus kas)}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

Related Party Transaction. *Related Party Transaction* (RPT) didefinisikan sebagai pengalihan sumber data, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Pengukuran RPT menggunakan rasio berikut ini :

$$\text{RPA} = \frac{\text{Transaksi RPT Assets}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

$$\text{RPL} = \frac{\text{Transaksi RPT Liabilities}}{\text{Total Liabilities}} \times 100\%$$

$$\text{RPS} = \frac{\text{Transaksi RPT Sales}}{\text{Total Sales}} \times 100\%$$

Pengungkapan tata kelola perusahaan. Pengungkapan tata kelola perusahaan diukur melalui Content Analysis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagian A-F yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) dalam Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (OJK, 2014). Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan tahunan perusahaan untuk menjawab 25 rekomendasi yang diajukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015. Berikut adalah rincian dari indicator content analysis dari OJK bagian A-F agar dapat menilai laporan tahunan perusahaan

Skor 0	Jika tidak ada pengungkapan informasi tata kelola.
Skor 1	Jika pengungkapan informasi tata kelola sebuah perusahaan dalam bentuk diagram (Figure, tabel, chart) yang menunjukkan satu kata hingga satu kalimat.
Skor 2	Jika pengungkapan informasi tata kelola berisikan minimum dua kalimat hingga dua paragraph.
Skor 3	Jika pengungkapan informasi tata kelola perusahaan berisikan dua hingga tiga paragraph.
Skor 4	Jika pengungkapan informasi tata kelola perusahaan berisikan empat hingga lima paragraph.
Skor 5	Jika pengungkapan informasi tata kelola perusahaan berisikan lebih dari lima paragraph.

Hasil Uji Statistik

Pada penelitian ini uji statistic deskriptif menggunakan SPSS versi 23 dan untuk analisis data menggunakan *SmartPLS ver 3.0*.

Variabel RPT yang memiliki 3 rasio yaitu RPA, RPL, dan RPS. Pada rasio RPA memiliki nilai minimum sebesar 0,00000 dan nilai maksimum sebesar 0,94778. Nilai rata-rata (*mean*) adalah 0,0537576 dengan standar deviasinya sebesar 0,11005889. Rasio RPL memiliki nilai minimum sebesar 0,00000 dan nilai maksimum sebesar 0,92293. Nilai rata-rata adalah 0,1106014 dengan standar deviasi sebesar 0,20415533. Rasio RPS memiliki nilai minimum sebesar 0,00000 dan nilai maksimum sebesar 0,96611. Nilai rata-rata sebesar 0,1543880 dan standar deviasi sebesar 0,26175730. Variabel *tax avoidance* memiliki 3 rasio. Rasio *current ETR* memiliki nilai minimum sebesar -3,28505 dan nilai maksimum sebesar 8,99520. Lalu nilai rata-rata sebesar 0,1930985 dan nilai standar deviasi sebesar 0,58642189. *GAAP ETR* memiliki nilai minimum sebesar -10,17136 dan nilai maksimum sebesar 8,81610. Nilai rata-rata sebesar 0,2014459 dan nilai standar deviasi sebesar 0,90586904. Selanjutnya ada *Cash ETR* memiliki nilai minimum sebesar -39,21280 dan nilai maksimum sebesar 54,75744. Lalu nilai rata-rata sebesar 0,6113671 dan nilai standar deviasi sebesar 4,21115996. Variabel moderasi yaitu pengungkapan tata kelola perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 1,16000 dan nilai maksimum sebesar 2,64000. Lalu nilai rata-rata sebesar 2,0058716 dan nilai standar deviasisebesar0,19392431.

Uji Outer Model. Pengujian ini terdiri dari uji *convergent validity*, *composite reliability* dan *discriminant validity*. Dalam uji *convergent validity* menggunakan pengukuran *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Dalam pengujian *Outer loading* pada *SmartPLS* adalah >0,7. Pada uji ini rasio *Current ETR*, *GAAP ETR*, *RPA*, dan *RPL* tidak memenuhi syarat dari pengujian *outer loading*, maka dari itu rasio tersebut dibuang. Setelah empat indikator pada *tax avoidance* dan *related party transaction* yang dihilangkan, maka semua indikator telah memiliki *outer loading* diatas 0,7. Rasio yang terpakai adalah rasio *cash ETR*, *RPS*, dan pengungkapan tata kelola perusahaan. Pada pengukuran *AVE* nilai minimum yang harus didapat oleh setiap indikator adalah >0,5. Seluruh indikator yang tersisa telah diuji nilainya dan melewati 0,5 untuk pengukuran *AVE*. selanjutnya dilakukan uji *composite reliability*. Dalam *composite reliability* dibagi menjadi 2 pengukuran yaitu *Cronbach's Alpha* yang setidaknya harus memiliki nilai >0,6 dan *Composite Reliability* yang setidaknya harus memiliki nilai >0,7. Seluruh indikator yang di uji menggunakan *composite reliability* melewati seluruh pengukurannya. Dan yang terakhir melakukan pengujian *discriminant validity* dengan pengukuran *cross loading* Menunjukan hasil bahwa semua indikator telah memenuhi validitas diskriminan dimana nilai loading pada konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai loading dengan konstruk yang lain. Pada variabel RPT, indikator RPS memiliki nilai 1,000 dimana nilai tersebut lebih besar dari -0,100, -0,053, dan -0,084. Lalu pada variabel *tax avoidance*, indikator *cash ETR* memiliki nilai 1,000 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,036, 0,015, -0,084. Selanjutnya pada variabel pengungkapan tata kelola perusahaan memiliki nilai 1,000 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,239, -0,053, dan 0,015. Pada *moderating effect* juga memiliki nilai 1,000 yang lebih besari dari 0,239, -0,100, dan 0,036. Dengan hasil diatas menunjukan bahwa model dalam pengujian ini telah lolos dalam uji validitas diskriminan.

Uji Model Pengukuran Formatif. Pada tahap pengujian ini dilakukan dengan melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antar indikator dengan melihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF diharuskan <3,3. Hasil dari uji multikolinearitas dari nilai VIF kurang dari 3,3 untuk semua indikator. Indikator *Cash ETR*, *CG*, dan *RPS* dan indikator moderasi telah memiliki nilai VIF = 1 yang nilainya kurang dari 3,3. Maka dari itu semua indikator pada penelitian ini telah terbebas dari multikolinearitas.

Uji Inner Model. Pada tahap pengujian inner model, akan dilakukan uji dengan dua model pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R²) dan uji predictive relevance (Q²). Sama seperti regresi liner R², SmartPLS bertujuan untuk menguji kemampuan konstruk eksogen menjelaskan variasi pada konstruk endogen. Ada 3 kriteria nilai R² yaitu apabila R² lebih besar dari 0.67 maka akan dikategorikan sebagai substansial, jika nilai R² lebih besar dari 0.33 artinya kuat, jika lebih besar dari 0.19 dikategorikan sebagai lemah (Hartono, 2015). Jadi apabila nilai R² semakin mendekati angka satu maka memiliki arti bahwa secara keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. R² adjusted sebesar 0,002. Penelitian ini memiliki R² yang kurang baik karena karena masuk pada kategori lemah. Artinya variabel RPT menjelaskan sebesar 0,02% terhadap variabel *tax avoidance*. Sisanya sebesar 99,98% dijelaskan dengan variabel lain. Pada penelitian ini nilai Q² sebesar -0,003. Jika nilai Q² semakin mendekati angka 1 berarti model dari Q² semakin baik. Nilai Q² pada penelitian ini memiliki nilai kurang dari 0 yang dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang sudah diobservasi memiliki rekonstruksi yang baik dan model pada variabel ini tidak memiliki relevansiprediktif.

Uji Hipotesis. Dalam pengujian hipotesis menggunkan pengukuran *path coefficient*, nilai pada t-statistik harus memiliki nilai >1,64 sedangkan pada nilai P value harus memiliki nilai <0.05 untuk 1 arah dan nilai t-statistik >1,96 dan P value <0,05 untuk pengujian 2 arah.

Hasil Uji Path Coefficient (setelah satu indikator dihilangkan)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Related Party Transaction - > <i>Tax avoidance</i>	-0.081	-0.081	0.029	2.827	0.005
Pengungkapan CG -> <i>Tax avoidance</i>	0.004	0.006	0.045	0.084	0.933
Moderating Effect -> <i>Tax avoidance</i>	0.022	0.021	0.028	0.790	0.430

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS 3.0

Diskusi

Pada hipotesis satu yaitu menguji apakah RPT memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hipotesis satu dilakukan dengan pengujian *one tailed*. Maka nilai T statistik pada hipotesis satu harus lebih dari 1,64 atau nilai P value harus kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat nilai T statistik dari RPT terhadap *Tax avoidance* yang menunjukkan nilai 2,827 yang menunjukkan bahwa nilai T statistik pada hipotesis satu lebih dari T tabel yaitu 1,64 atau dapat dilihat dari nilai P valuenya yaitu sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis satu didukung oleh data pada penelitian ini (H_1 diterima). Maka H_1 pada penelitian ini yang menyatakan “terdapat pengaruh positif antara RPT terhadap *Tax avoidance*” diterima.

Pada hipotesis dua yaitu menguji apakah pengungkapan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hipotesis dua dilakukan dengan pengujian *one tailed*. Maka nilai T statistik pada hipotesis dua harus lebih dari 1,64 atau nilai P value harus kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat nilai T statistik dari pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen tunai yang menunjukkan nilai 0,084 yang menunjukkan bahwa nilai T statistik pada hipotesis satu kurang dari T tabel yaitu 1,64 atau dapat dilihat dari nilai P valuenya yaitu sebesar 0,933 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis dua tidak didukung oleh data pada penelitian ini (H_2 ditolak). Maka H_2 pada penelitian ini yang menyatakan “terdapat pengaruh negatif antara pengungkapan tata kelola perusahaan terhadap *Tax avoidance*” ditolak.

Pada hipotesis tiga yaitu menguji apakah pengungkapan tata kelola perusahaan memoderasi memiliki pengaruh antara RPT terhadap *Tax avoidance*. Hipotesis tiga dilakukan dengan pengujian *two tailed*. Maka nilai T statistik pada hipotesis tiga harus lebih dari 1,96 atau nilai P value harus kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat nilai T statistik dari *moderating effect* 1 terhadap kebijakan dividen tunai yang menunjukkan nilai 0.790 yang menunjukkan bahwa nilai T statistik pada hipotesis satu kurang dari T tabel yaitu 1,94 atau dapat dilihat dari nilai P valuenya yaitu sebesar 0.430 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis tiga tidak didukung oleh data pada penelitian ini (H_3 ditolak). Maka H_3 pada penelitian ini yang menyatakan “terdapat pengaruh antara *Related Party Transaction* terhadap *Tax avoidance* dimoderasi oleh pengungkapan tata kelola perusahaan” ditolak.

Penutup

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: (1) Keterbatasan pengetahuan, waktu, dan dari peneliti yang memungkinkan hasil yang didapatkan kurang valid. (2) Data yang diambil untuk rasio *Cash ETR* adalah dari *cash flow*. Data tersebut tidak terperinci (mencakup semuanya) apakah nominal tersebut adalah PPh 29, PPh 25 bulan Desember. (3) Data tentang pengungkapan tata kelola perusahaan yang diambil menggunakan *content analysis* yang bersifat subjektif.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Penelitian yang dikembangkan untuk berikutnya dapat dilakukan pada sector-sektor lain diluar sector manufaktur seperti sector perbankan dan perusahaan jasa. (2) Penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan tahun 2018 karena dalam penelitian ini laporan keuangan tahun 2018 belum terbit sepenuhnya. (3) Penelitian berikutnya apabila menggunakan konten analisis dapat menggunakan software NVivo.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Willy & Hartono, Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta.
- Jensen, Michael C., & Meckling, William H (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4), 305- 306.
- Schroeder, Richard G., Myrtle W. Clark, Jack M. Cathey, 2001, *Accounting Theory and Analysis–Text Cases and 1 Readings*, 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Oktofian, Muhammad (2015). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rizal, Muhammad. (2016). Why Company Does Tax Avoidance? Evidence from a Manufacturing Company in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Business and Management Invention* (ISSN), 5 (5), 63-70.
- Sumantri, Farid Addy, dkk. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 1 (2), 59-74.
- Srinivasan, P. (2013), An Analysis of Related-Party Transactions in India, Working Paper No. 402, Indian Institute of Management Bangalore (2013)
- Chen et al., (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 41-61.
- Azizah, N., & Kusmuriyanto, K. (2016). The Effect of Related Party Transaction, Leverage, Commissioners and Directors Compensation on Tax Aggressiveness. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 307-316.
- Samrotun, Y. C dan Suhendro. “Strategi Perencanaan Pajak dalam Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility”. 3rd Economics & Business Research Festival. pp. 1513-1542. 2014.
- SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/SEOJK.04/2015 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA.
- KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP-117/M-MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN).
- <https://id.beritasatu.com/home/apbn-dan-pengampunan-pajak/138862>
diunduh pada 27 September 2018 jam 21.10
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181109100915-4-41339/sri-mulyani-tax-ratio-dan-keogahan-orang-ri-bayar-pajak> diunduh pada 25 September 2018 jam 15.30
- <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-12-psak-7-pengungkapan-pihakpihak-berelasi> diunduh pada 17 September 2018 jam 18.50